

MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE DIPA 005.401665 SEMESTER
TA 2025

LAPORAN KEUANGAN

2025

Disusun Oleh :
SITI MAWADDAH, SOS.I

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lhokseumawe, 30 Juni 2025

Ketua Pengguna Anggaran,



Yusuf Luthfi, SH

NIP. 197612292003121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	21
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	26
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	29
F. Pengungkapan Penting Lainnya	30
VI. Lampiran dan Daftar	39
Lampiran Rekening Koran	40



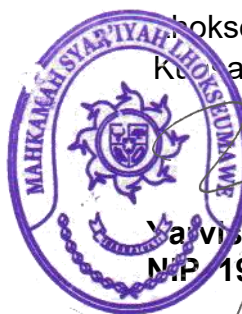
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

Jl. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Telp. (0645) 43925 fax. (0645) 41809
website: <http://ms-lhokseumawe.go.id>, email: ms.lhokseumawe@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Mahkamah Syariah Lhokseumawe yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan ekuitas, dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Lhokseumawe, 30 Juni 2025
Ketua Pengguna Anggaran,

Yarvis Luthfi, SH
NIP. 197612292003121001

Laporan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp21.434.500,-** atau mencapai persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp35.075.000**

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar **Rp 32.658.500** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp, 32.658.500,-** Piutang Jangka Pendek (neto) sebesar **Rp,36.658.500,-** Aset Tetap (neto) sebesar **Rp0** dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp0**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp 36.658.500** dan **Rp.(4.000.000,-)**

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar **Rp.12.254.820,-** sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp. 16.225.940** sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp.5.208.560**. Surplus Kegiatan Non Operasional dan surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp0** dan sebesar **Rp0** sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar **Rp. (5.208.560)**

1. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar **Rp0** dikurangi defisit-LO sebesar **Rp(5.208.560)** dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai **Rp0** dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp(5.208.560)** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai **Rp0**.

2. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Th. 2025					Th. 2024
	Catatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas (dibawah)	%	Realisasi
Pendapatan	B.1	-				
pendapatan PNBP	B.1	35.075.000	21.434.500	(13.640.500)	61.11	17.362.500
JUMLAH PENDAPATAN		35.075.000	21.434.500	(13.640.500)	61.11	17.362.500
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai	B.3					
Belanja Barang	B.4	76.850.000	15.500.000	(61.350.000)	20.17	34.360.000
Belanja Modal	B.5					
Belanja Bantuan Sosial	B.6					
JUMLAH BELANJA		76.850.000	15.500.000	(61.350.000)	20.17	34.360.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE
NERACA
PER 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	2.500.000	4.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	9.754.820	27.618.500
Persediaan	C.1.3	0	1.040.000
JUMLAH ASET LANCAR		12.254.820	32.658.500
JUMLAH ASET		12.254.820	32.658.500
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2		
Uang Muka dari KPPN	C.2.1	2.500.000	4.000.000
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.2	9.754.820	30.418.500
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.2.3	0	2.240.000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		12.254.820	36.658.500
JUMLAH KEWAJIBAN		12.254.820	36.658.500
EKUITAS			
EKUITAS	C.3		
Ekuitas		0	(4.000.000)
JUMLAH EKUITAS		0	(4.000.000)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12.254.820	32.658.500

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	21.434.500	17.362.500
JUMLAH PENDAPATAN		21.434.500	17.362.500
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	2.225.940	1.500.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	12.500.000	12.500.000
Beban Pemeliharaan	D.5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.500.000	25.400.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0
JUMLAH BEBAN		16.225.940	39.400.000
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		5.208.560	(22.037.500)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Beban Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		5.208.560	(22.037.500)
POS LUAR BIASA	D.12	0	0
Beban Luar Biasa		0	0
JUMLAH POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		5.208.560	(22.037.500)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	5.208.560	-22.037.500
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	- 5.208.560	18.037.500
KENAIKAN / PENURUNAN ENTITAS		0	-4.000.000
EKUITAS AKHIR	E.6	- -	4.000.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.007/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Entitas berkedudukan Jalan Banda Aceh-Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.

- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

Pendapatan -LRA

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

**Pendapatan
-LO**

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua	50%

	tidak dilakukan pelunasan	
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa

koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga

perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseume telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Rincian revisi tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	35.075.000	43.192.000
Jumlah Pendapatan	35.075.000	43.192.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	76.850.000	34.360.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	76.850.000	34.360.000

Pendapatan

B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Semester I TA 2025 adalah sebesar Rp21.454.500 atau mencapai 61,11% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp35.075.000. Pendapatan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	35.075.000	21.434.500	61,11
Jumlah	35.075.000	21.434.500	61,11

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 23,45% dibandingkan 2024. Hal ini disebabkan rasio pendaftaran perkara yang meningkat.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Naik/ (Turun) %
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	21.434.500	17.362.500	23,45
Jumlah	21.434.500	17.362.500	23,45

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Semester I TA 2025 adalah sebesar Rp.15.500.000

Realisasi
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
Rp21.454.500 ,-

Realisasi Belanja
Negara.
Rp15.500.000,-

atau 20.17% dari anggaran belanja sebesar Rp76.850.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	-
Belanja Barang	76.850.000	15.500.000	20,17
Belanja Modal	0	0	-
Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
Jumlah	76.850.000	15.500.000	20,17

Dibandingkan dengan Semester I TA 2024, Realisasi Belanja Semester I TA 2025 mengalami (penurunan) sebesar (54,89)%. Hal ini disebabkan antara lain:

Rasio realisasi meningkat

Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Naik/ (Turun) %
Belanja Pegawai	0	0	-
Belanja Barang	15.500.000	34.360.000	(54,89)
Belanja Modal	0	0	-
Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
Jumlah	15.500.000	34.360.000	(54,89)

Realisasi Belanja
Barang
Rp15.500.000,-

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.500.000 dan Rp34.360.000. Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2025 mengalami kenaikan/(penurunan) (54,89)% dari Realisasi Belanja Barang 2024. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya peningkatan di Belanja Jasa Konsultasi, Belanja Bahan dan Belanja Perjalanan Dinas.

Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Naik/ (Turun) %
Belanja Pengiriman Surat dinas Pos Pusat	0	0	-
Belanja Bahan	0	0	-
Belanja Barang Persediaan Persediaan Barang Komsumsi	1.500.000	1.500.000	0,00
Belanja Jasa Konsultasi	12.500.000	12.500.000	0,00
Belanja Jasa Lainnya	0	0	-
Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000	20.360.000	(92,63)
Jumlah Belanja Kotor	15.500.000	34.360.000	(54,89)
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah	15.500.000	34.360.000	(54,89)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

Aset Lancar
Rp0

Jumlah Aset Lancar Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Aset Lancar merupakan asset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tertanggal pelaporan.

C. 1. 1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp4.000.000

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara pertanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp4.000.000** dan **Rp4.000.000** dengan rincian sebagai berikut : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	4.000.000	4.000.000
BANK SYARIAH INDONESIA	0	0
Jumlah	4.000.000	4.000.000

Kas di bendahara
Penerimaan Rp0

C. 1. 2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	0	0
BANK SYARIAH INDONESIA	0	0
Jumlah	0	0

C. 1. 3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp15.171.000

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp27.618.500** dan **Rp27.618.500**.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu Investasi Jangka Pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Lainnya di bendahara Pengeluaran	4.000.000	4.000.000
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	27.618.500	27.618.500
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	31.618.500	31.618.500

C.1.10 Persediaan

Persediaan

Rp1.040.000

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp1.040.000** dan **Rp1.040.000**

Rincian Persedian TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Konsumsi	1.040.000	1.040.000
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	1.040.000	1.040.000

Semua Jenis Persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C. 3 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka

Pendek

Rp36.658.500

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atas jatuh tempk dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp36.658.500** dan **Rp36.658.500**.

C. 3.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari

KPPN Rp4.000.000

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp4.000.000** dan **Rp4.000.000**, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp30.418.500

C. 3.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp30.418.500** dan **Rp30.418.500**, Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Utang kepada Pihak Ketiga	30.418.500
2	Utang yang belum ditagih	2.240.000
3	Uang muka dari KPPN	4.000.000
	Total	36.658.500

Pendapatan Jasa Giro merupakan bunga bank pada rekening penampungan lainnya yang belum terdaftar pada ***Treasury National Pooling (TNP)*** dan belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan.

Potongan Pajak merupakan pungutan pajak bendahara pengeluaran atas transaksi Uang Persediaan yang belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan Uang Makan Pegawai bulan Juni yang belum dibayarkan kepada para pegawai Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp36.658.500

C. 3.3. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp36.658.500** dan **Rp36.658.500**, merupakan kewajiban pemerintah kepada

Pihak Ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024
Uang Titipan Pihak Ketiga	30.418.000	30.418.000
GU Yang belum dipertanggung jawabkan	2.240.000	2.240.000
Uang Muka dari KPPN	4.000.000	4.000.000
Jumlah	36.658.000	36.658.000

C. 4. Ekuitas

Ekuitas
Rp(4.000.000)

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp(4.000.000)** dan **Rp(4.000.000)**. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp21.434.500*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan periode 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp21.434.500 dan Rp17.362.500 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0,00%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	21.434.500	17.362.500	2345,28%
Pendapatan Lain - lain	0	0	0,00%
Jumlah	21.434.500	17.362.500	2345,28%

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan yang merupakan belanja barang dan belanja modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya.

D.2 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp. 1.500.000,-*

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2025 dan periode 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp1.500.000** dan **Rp1.500.000** Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	1.500.000	1.500.000	0,00
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Beban	1.500.000	1.500.000	0,00

D.3 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa Rp12.500.000*

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode 30 Juni 2025 dan periode 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp12.500.000** dan **Rp12.500.000**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban – beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*, penurunan beban sewa yang disebabkan adanya pembelian asset sehingga tidak dilakukan penyewaan. Walaupun sebagian besar beban barang dan jasa mengalami penurunan, terdapat beban Listrik dan jasa profesi yang meningkat karena disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan dan mengundang praktisi sebagai narasumber atau penceramah pada kegiatan diklat.

Rincian Beban Barang dan Jasa

TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	0	0	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	0,00
Beban Jasa Konsultasi	12.500.000	12.500.000	0,00
Beban Langganan Listrik dan Telpo	0	0	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	0	0	0,00
Beban Sewa	0	0	0,00
Jumlah Beban	12.500.000	12.500.000	0,00

Beban Perjalanan Dinas D.4 Beban Perjalanan Dinas

Dinas

Rp1.500.000,-

Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2025 dan periode 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp1.500.000** dan **Rp25.400.000**. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan yang perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2025 dan periode 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas

Periode 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Perjalanan Biasa	1.500.000	25.400.000	(94,09)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0,00
Jumlah Beban	1.500.000	25.400.000	(94,09)

D.5 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa

Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban Pos Luar Biasa untuk 30 Juni 2025 dan periode 30 Juni 2024

D.6 Surplus/ Defisit LO

Surplus/Defisit LO

Rp. 5.208.560

Surplus/Defisit LO terdiri dari Kegiatan Operasional dan Non Operasional dan juga Pos Luar Biasa. Periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp5.208.560** dan **Rp(22.037.500)**.



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 401665
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	76,850,000	76,850,000	0
2	Belanja	15,500,000	15,500,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	35,075,000	35,075,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	21,434,500	21,434,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	2,500,000	2,500,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,500,000	2,500,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JUL-25



BERITA ACARA PEMERIKSAAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN (04)
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE

Nomor : 226/SEK.MS.W1-A5/PL1.1/6/2025

Nama Satker : Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Kode Satker : 401665
UAPPB-W : Mahkamah Syar'iyah Aceh
UAPPB-E1 : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini

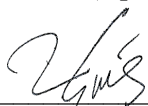
1. Nama : Yarvis Luthfi, SH
NIP : 197612292003031001
Jabatan : Kasub Umum dan Keuangan
2. Nama : Abdul Muthalib, A.Md.S.H.M.H
NIP : 19791606
Jabatan :
3. Nama : Siti Mawaddah, S.Sos.I
Jabatan : Anggota


Menyatakan bahwa telah melakukan **Stock Opname** barang persediaan Semester I Tahun 2025, dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik (*Stock Opname*).

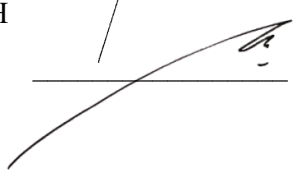
Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Barang Persediaan (Opname Fisik)

1. Yarvis Luthfi, SH.
2. Abdul Muthallib, A.Md.,S.H.,M.H
3. Siti Mawaadah, S.Sos.I







Mengetahui,

Kuasa Pengguna Barang
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe



Yarvis Luthfi, S.H.
NIP. 197612292003031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Agama 04
SATUAN KERJA : MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWA 401665

Tgl Data : 25/07/25 7:06 AM
Tgl Cetak : 25/07/25 9:57 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	35,075,000	21,434,500	(13,640,500)	61.11	43,192,000	17,362,500	(25,829,500)	40.2
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	35,075,000	21,434,500	(13,640,500)	61.11	43,192,000	17,362,500	(25,829,500)	40.2
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	35,075,000	21,434,500	(13,640,500)	61.11	43,192,000	17,362,500	(25,829,500)	40.2
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	76,850,000	15,500,000	(61,350,000)	20.17	76,850,000	34,360,000	(42,490,000)	44.71
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	76,850,000	15,500,000	(61,350,000)	20.17	76,850,000	34,360,000	(42,490,000)	44.71
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Agama 04
SATUAN KERJA : MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWE 401665

Tgl Data : 25/07/25 7:06 AM
Tgl Cetak : 25/07/25 9:57 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	76,850,000	15,500,000	(61,350,000)	20.17	76,850,000	34,360,000	(42,490,000)	44.71
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

LHOK SEUMAWE, 25 Juli 2025
Pejabat Penganggung Jawab UAKPA
KPA/PPK
YARVIS LUTHFI, S.H.
NIP. 197512292003121001



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 04 **Ditjen Badan Peradilan Agama**
WILAYAH/PROVINSI : 0600 **NANGGROE ACEH DARUSSALAM**
SATUAN KERJA : 401665 **MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWÉ**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 25/07/25 9:59 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 25/7/25 8:14 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,000,000	3,000,000	1,500,000	0	1,500,000	50	1,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	3,000,000	3,000,000	1,500,000	0	1,500,000	50	1,500,000
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	30,000,000	30,000,000	12,500,000	0	12,500,000	41.67	17,500,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	700,000	700,000	0	0	0	0	700,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	30,700,000	30,700,000	12,500,000	0	12,500,000	40.72	18,200,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40,450,000	40,450,000	1,500,000	0	1,500,000	3.71	38,950,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	40,450,000	40,450,000	1,500,000	0	1,500,000	3.71	38,950,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	76,850,000	76,850,000	15,500,000	0	15,500,000	20.17	61,350,000
	JUMLAH BELANJA	76,850,000	76,850,000	15,500,000	0	15,500,000	20.17	61,350,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 04 Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : 0600 NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : 401665 MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWÉ

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 25/07/25 9:59 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1,370,000	1,050,000	0	1,050,000	76.64
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	12,530,000	7,335,000	0	7,335,000	58.54
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	21,175,000	13,049,500	0	13,049,500	61.63
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	35,075,000	21,434,500	0	21,434,500	61.11
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	35,075,000	21,434,500	0	21,434,500	61.11
	JUMLAH PENDAPATAN	35,075,000	21,434,500	0	21,434,500	61.11

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'IAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 25/07/25 7:06 AM

Tgl Cetak : 25/07/25 9:58 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	2,500,000	0	2,500,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	9,754,820	0	9,754,820	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	12,254,820	0	12,254,820	
JUMLAH ASET	12,254,820	0	12,254,820	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	9,754,820	0	9,754,820	0.00
Uang Muka dari KPPN	2,500,000	0	2,500,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	12,254,820	0	12,254,820	
JUMLAH KEWAJIBAN	12,254,820	0	12,254,820	

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12,254,820	0	12,254,820	
-------------------------------------	-------------------	----------	-------------------	--

Keterangan :

FINAL

MAHKAMAH SYAR'IAH LHOK SEUMAWE, 25 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
YARVIS LUTHFI, S.H.
NIK. 197602292003121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'IAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 25/07/25 7:06 AM

Tgl Cetak : 25/07/25 9:58 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,500,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	9,754,820	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	9,754,820
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	2,500,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	15,500,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	21,434,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	725,940
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	1,050,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	7,335,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	13,049,500
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	12,500,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,225,940	0
JUMLAH			49,915,260	49,915,260

Keterangan :

FINAL



LHOK SEUMAWE, 25 Juli 2025

Pejabat yang Jawab UAKPA

KPA/PPK

YARVIS LUTHFI, S.H.

N.P. 107612292003121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 25/07/25 6:27 AM
Tgl Cetak : 25/07/25 9:58 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	15,500,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	21,434,500	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	1,050,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	7,335,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	13,049,500
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,500,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	12,500,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0
JUMLAH			36,934,500	36,934,500

Keterangan :
FINAL

MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWE, 25 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KRA/PPK
YARVIS/UTHFI, S.H.
3701202003121001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'IAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 25/07/25 7:06 AM
 Tgl Cetak : 25/07/25 9:57 AM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	21,434,500	17,362,500	4,072,000	23.453
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	21,434,500	17,362,500	4,072,000	23.453
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	21,434,500	17,362,500	4,072,000	23.453
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	2,225,940	1,500,000	725,940	48.396
Beban Barang dan Jasa	12,500,000	12,500,000	0	0
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	1,500,000	25,400,000	(23,900,000)	(94.094)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'IAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 25/07/25 7:06 AM

Tgl Cetak : 25/07/25 9:57 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	16,225,940	39,400,000	(23,174,060)	(58.817)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5,208,560	(22,037,500)	27,246,060	(123.635)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5,208,560	(22,037,500)	27,246,060	(123.635)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	5,208,560	(22,037,500)	27,246,060	(123.635)

Keterangan :
FINAL

MAKAMAH SYAR'IAH HOKSEUMAWE, 25 Juli 2025
Pengung Jawab UAKPA
KPA/PPK
YARVIS LUTHFI, S.H
NIP. 19762292003121001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'IAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 25/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 25/07/25 9:57 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	5,208,560	(22,037,500)	27,246,060	(123.63)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(5,208,560)	18,037,500	(23,246,060)	(128.88)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	(4,000,000)	4,000,000	(100)
EKUITAS AKHIR	0	(4,000,000)	4,000,000	(100)

Keterangan :

FINAL

MAHKAMAH SYAR'IAH LHOK SEUMAWE, 25 Juli 2025
 Per. gung Jawab UAKPA
 KPA/PPK
 YANUS LUTHFI, S.H.
 NIP. 197612292003121001

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) SEMESTER I

Kode dan Nama UAKPA : (401665) KANTOR MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

Kode dan Nama UAPPAW : (0600) MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH



Kode dan Nama Eselon 1 : (05) BADAN PERDILAN AGAMA

Kode dan Nama K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	Sama
PENGCEKAKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat	✓	Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditikan per tanggal pelaporan		✓
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada,		✓
6	Terdapat Aset Belum Diditikan per tanggal pelaporan		✓
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan		✓
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		✓
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah			
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		✓
	a. Pagu/DIPA		✓
	b. Estimasi PNB		✓
	c. Belanja		✓
	d. Pengembangan Belanja		✓
	e. Pendapatan		✓
	f. Pengembangan Belanja		✓
	g. Kas BLU		✓
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		✓
	i. Kas Hibah		✓
	j. Pengesahan Hibah Langsung		✓

	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal)		V	Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		V	Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		V	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke		V	Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul		V	Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		V	Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		V	Tidak

4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		V	Tidak
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		V	Tidak
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		V	Tidak
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		V	Tidak
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		V	Tidak
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		V	Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada		V	Tidak
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat		V	Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Tidak
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya		V	Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar		V	Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN		V	Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening		V	Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan		V	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		V	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		V	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang		V	Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat		V	Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar		V	Ya
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?		V	Tidak

	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti		V	Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah		V	Tidak
TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		V	Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		V	Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		V	Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		V	Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :		V	Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ya
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ya
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akreal?		V	Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		V	Tidak
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		V	Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ?		V	Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
	Pengecekan Jurnal Manual Akreal pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akreal		V	Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		V	Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akreal		V	Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akreal		V	Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		V	Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akreal		V	Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akreal	V		Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk				
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL,  IHKSAN, ST		Lhokseumawe, 30 Juni 2025 Telaah,  Marys Luthfi, SH		